

## TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH, INFLASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

Indra Suhendra<sup>1</sup>, Bayu Hadi Wicaksono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
e-mail: indras\_23@yahoo.com

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
e-mail: bayuhw@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The aim of this study is to determine the influence of education level, wages, inflation, and economic growth to unemployment rate in Indonesia during the Period of 2010 to 2012. Panel data regression analysis model is conducted as the research model. The research results shows that during 2010 to 2012, educations level in bachelor degree (TPS1), wages, inflation and economic growth have significant effect to unemployment rate, whereas education level in senior high school (TPSMA) has not significant influence to unemployment rate. Simultaneously the independent variables have significant influence to the dependent variable. The coefficient of determination (R<sup>2</sup>) shows 0.722353, meaning that the variation of dependent variable can be explained by the variation of independent variables as many as 72.2353 percent .*

**Keywords:** Level of Education, Wages, Inflation, Economic Growth, Unemployment

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh tingkat pendidikan, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2010 sampai 2012. Regresi panel data digunakan sebagai model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai 2012, tingkat pendidikan sarjana (TPS1), upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pendidikan SMA (TPSMA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Secara simultan, variabel- variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan angka 0.722353, yang berarti bahwa variasi dari variabel dependent dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent sebesar 72.2353 persen.*

**Kata kunci:** Tingkat pendidikan, Upah, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran

## 1. PENDAHULUAN

Suatu negara dalam perekonomian tentu menginginkan kemajuan atau perkembangan yang cukup signifikan, maju atau mundurnya suatu Negara dapat dilihat dari perekonomiannya. Menurut Meier dan Rouch dalam Arsyad (2000:3) kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan terutama sekali pada maksimisasi pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi.

Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Pengaruh kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang berkualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan (Todaro, 2000:18). Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara umum. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2003:61).

Dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa lapangan kerja yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tercipta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang menjadi masalah serius, di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut Arsyad (Dalam Subandi, 2011:14), beberapa masalah ketenagakerjaan yang dapat berdampak pada pengangguran diantaranya, adalah: pertama, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi dalam pasar tenaga kerja, meski permintaannya ada (*mismatch*). Kedua, permasalahan upah tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran. Ketiga, adanya inflasi yang mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mendorong pengurangan tenaga kerja. Keempat, keterbatasan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja, sehingga adanya penambahan tenaga kerja baru, tidak dapat diserap oleh penambahan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut beberapa indikator ekonomi yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengangguran adalah: tingkat pendidikan, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Di seluruh daerah di Indonesia pada saat ini memiliki permasalahan yang serius dalam hal ketenagakerjaan. Sebagai negara berkembang yang mempunyai jumlah industri yang cukup memadai diseluruh daerah di Indonesia, namun di daerah-daerah Indonesia masih banyak memiliki jumlah pengangguran yang masih tinggi juga.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengangguran, pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja (*the working capacity*) atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan yang diselesaikan oleh seseorang merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Adapun tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dari penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA dan penduduk yang menamatkan pendidikan universitas. Diasumsikan penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir TPSMA tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga tidak dapat berkompetisi dipasar tenaga kerja, akibatnya pengangguran meningkat.

Sedangkan, penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir sarjana mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga dapat berkompetisi dipasar tenaga kerja. Akibatnya lebih mudah diserap sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah. Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk suatu negara. Pendidikan berdampak positif bagi pembangunan, Semakin tinggi pendidikan penduduk, kontribusi dalam kegiatan perekonomian juga semakin tinggi ditunjukkan oleh besaran TPAK yang meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan (BPS, 2008:4). Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja (*the working capacity*) atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan formal merupakan persyaratan teknis yang dipersyaratkan pemberi kerja untuk mengisi lowongan kerja sehingga pendidikan menjadi faktor penting bagi masyarakat agar dapat bekerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Variabel yang kedua yaitu Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran. Jika semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Variabel ketiga yang mempengaruhi pengangguran adalah inflasi, Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Putong, 2009:256) Inflasi merupakan faktor penyebab dari naiknya harga biaya produksi. Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong terjadinya penurunan terhadap penggunaan faktor produksi (termasuk tenaga kerja).

Variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran ialah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Secara umum meningkatnya pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja dengan asumsi apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat di suatu wilayah, berarti output dari seluruh kegiatan ekonomi tersebut menjadi meningkat. Meningkatnya output hasil dari kegiatan perekonomian akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah pengangguran tenaga kerja yang diminta, sehingga dapat mengurangi pengangguran (Riza Adytia Surya (2010), Isti Qomariyah (2013), Roby Cahyadi Kurniawan (2013).

## **1 TINJAUAN LITERATUR**

### **1.1 Pengangguran**

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan dan tidak berperan dalam proses produksi barang dan jasa (Mankiw, 2006:131). Menurut teori Keynes yang menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja.

Artinya, dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun dan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang menimbulkan pengangguran. Selanjutnya, dengan turunnya produksi seharusnya diikuti dengan turunnya tingkat upah, tetapi karena tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan peningkatan pengangguran, inilah penyebab pengangguran karena defisiensi permintaan agregat.

Pada mulanya Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk berusia 15 tahun keatas yang dalam kondisi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan dapat dilakukan oleh mereka yang sama sekali belum pernah bekerja atau mereka yang pernah bekerja karena suatu hal berhenti atau diberhentikan.

Tingkat pengangguran adalah persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan (Mankiw, 2006:159). Menurut Afrida (2003:135). Sedangkan Menurut Sukirno (2010:14), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya.

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja berusia 15 tahun atau lebih yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan kriteria penduduk berusia 10 tahun ke atas sebagai kelompok tenaga kerja. (Kusumawardani, 2012:15). Namun tidak semua penduduk yang mampu bekerja ini benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja dinamakan angkatan kerja. Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja disebut bukan angkatan kerja, yaitu mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan, dan lain-lain.

## **1.2 Tingkat Pendidikan**

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat positif, jika suatu Negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya Negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apapun (Todaro, 2000:384).

Harbison dan Myers menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan manusia, keahlian dan keterampilan, serta kemampuan orang-orang dalam suatu masyarakat (Rachbini, 200:123). Dalam hal tersebut dapat diartikan pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib didapat oleh masyarakat.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

### **1.3 Upah**

Menurut Sukirno, (2005:366) upah merupakan pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja dari hasil melakukan suatu kegiatan ekonomi atau untuk menghasilkan barang dan jasa. Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat.

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin misalnya tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008).

John Maynard Keynes menjelaskan para pekerja memiliki semacam serikat tenaga kerja (Labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai kecil sekali), tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat menyebabkan jumlah permintaan akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga (Mulyadi, 2003:9).

Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (jumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).

### **1.4 Inflasi**

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. (Putong, 2009: 256) Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (ataumengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Sukirno (2002:89) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran dapat dilihat dari pendapat Phillip, yang mengenalkan kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang menjelaskan suatu hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan kenaikan upah nominal, Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dengan kata lain terdapat *trade off* antara inflasi upah dan pengangguran. Kurva Phillips menunjukkan bahwa tingkat inflasi upah menurun seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran (Fischer, 2004:150).

Kurva Phillips berimplikasi bahwa upah dan harga menyesuaikan diri secara lambat terhadap permintaan agregat (Alghofari, 2010:6). Kurva Phillips dengan cepat dengan cepat menjadi pondasi dari analisa kebijakan makroekonomi. Kurva Phillips menyarankan bahwa kebijakan dapat memilih kombinasi yang berbeda-beda antara inflasi dengan tingkat pengangguran (Fischer, 2004).

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002).

### **1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, dalam Fatmi R.N 2010), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, danpenyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2004:57).

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya adalah pada tiga aspek, yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu "proses", bukan gambaran sesaat (Sukirno, 2006:320).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu keadaan sistem perekonomian yang ada di Negara, suatu Negara bisa mengukur baik tidaknya perekonomian bisa diukur melalui pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan ekonomi di suatu Negara kecil maka pemerintah harus melakukan kebijakan ekonomi guna menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di negaranya, dan jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka pemerintah harus mempertahankan bahkan menaikannya lebih tinggi pertumbuhan dan pembangunan ekonominya.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum istilah pertumbuhan ekonomi besarnya digunakan menyatakan perkembangan ekonomi di Negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di Negara sedang berkembang (Arsyad, 2010).

Arthur Okun (1929-1979) adalah salah seorang pembuat kebijakan paling kreatif pada era sehabis perang. Ia membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antara output dan pengangguran. Pengangguran biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran yang luar biasa ini berbarengan dengan hubungan numerikal yang sekarang dikenal dengan nama Hukum Okun. Hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran didasarkan pada hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat GDP suatu Negara. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja. Pada siklus bisnis, pengangguran bergerak bersamaan dengan output. Agar pengangguran tidak meningkat maka GDP harus ditingkatkan setinggi-tingginya (Samuelson, 2004: 365).

Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi/rendahnya tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam negara tersebut atau untuk skala yang lebih kecil lingkungannya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berarti peningkatan pendapatan daerah. Dapat di simpulkan bahwa Hukum Okun (*Okun's law*) menjelaskan hubungan yang negatif antara pengangguran dengan PDRB. Bahwa setiap peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, sehingga, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, maka jumlah pengangguran akan cenderung meningkat, Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka masalah pengangguran dapat berkurang.

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Nikensari (2001) meneliti tentang dampak struktur dari pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu sektor industri, perdagangan dan ketenaga kerjaan. Metode yang digunakan analisis Diskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan model analisa *Computabel General Equilibrium* (CGE) dan kalkulasi hukum Okun. Hal-hal yang akan dicari dalam analisa simulasi ini adalah proyeksi struktur dan besarnya penyerapan tenaga kerja tahun 2003-2007, yang diakibatkan oleh pertumbuhan sektor industri dan perdagangan serta sektor-sektor lain, dengan mengacu pada prakiraan tingkat ratio antara *inventory investment* terhadap *gross output* tahun yang bersangkutan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, seiring dengan laju pertumbuhan PDB, maka kebutuhan tenaga kerja pertanian, tenaga kerja produksi, tenaga kerja operasional serta tenaga kerja profesional juga meningkat. Persentase peningkatan tenaga kerja operasional dan profesional yang biasanya diisi oleh lulusan siswa setingkat akademi dan universitas lima tahun ke depan (dari tahun 2003-2007) cenderung meningkat. Hukum Okun yang menganalisa hubungan

terbalik antara laju pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran dapat dibuktikan dengan data di Indonesia. Dari prakiraan laju pertumbuhan PDB yang semakin meningkat dalam lima tahun ke depan oleh peneliti, dengan asumsi tingkat pertumbuhan angkatan kerja nol persen, diperoleh tingkat pengangguran yang semakin menurun dari tahun ke tahun lima tahun ke depan.

2. Nando (2005) meneliti tentang pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi dan pengangguran. Model yang digunakan koefisien korelasi momen-hasil kali person atau singkatnya disebut dengan koefisien korelasi. Studi ini seluruhnya memanfaatkan data statistik yang diperoleh dari BPS periode 1987 hingga 1996. Dalam penelitian ini mencoba mengamati pengaruh antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia pada masa sebelum dan setelah krisis. Adanya hubungan inflasi dengan pengangguran yaitu kurva Phillips dimana adanya hubungan terbalik (*trade-off*) antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

Apabila inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran rendah. Demikian pula sebaliknya, apabila inflasi rendah, maka tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran dari pengujian statistik Z-hitung lebih besar dari Z-tabel maka  $H_0$  diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran. Dengan demikian, pada masa sebelum dan pada masa krisisekonomi laju inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia.

3. Fatmi Ratna (2010) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Indonesia, (faktor-faktor tersebut adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi). Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dilakukan dengan menggunakan 21 data pada tahun 1988-2008. Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel pertumbuhan ekonomi saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran dengan probabilitas 0,0000, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran dengan probabilitas 0,2586.

## **1.6 Pengembangan Hipotesis**

### **1.6.1 Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran**

Variabel tingkat pendidikan jugamerupakan variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Melalui pendidikan yang diselesaikan seseorang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas Berdasarkan pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar kemampuan produksi seseorang, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang tersebut ditempatkan dalam pekerjaan. Usaha pembinaan sumber daya manusia telah disetujui sebagai salah satu usahapenciptaan kesempatan kerja yang dapat mengurangi pengangguran (Yos Merizal, 2008).

Pendidikan tersebut termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumberdaya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan *Human Capital* (modal manusia). Invetasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai ketersediaan manusia, dimana nilai ketersediaan manusia setelah mengikuti pendidikan dengan



berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan manfaat sosial (*social benefit*) individu dibandingkan dengan sebelum meramalkan pendidikan. (Idris, 2007:69)

Dengan tingginya tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pembagian dari penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA terhadap lulusan diploma yang dinotasikan TPSMA dan penduduk yang menamatkan pendidikan sarjana dibagi dengan penduduk lulusan Diploma yang dinotasikan TPS1. Diasumsikan penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA dibagi dengan Diploma (TPSMA) tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga tidak dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja, akibatnya pengangguran meningkat. Sedangkan, penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir sarjana dibagi dengan tamatan pendidikan diploma (TPS1) mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja. Akibatnya lebih mudah diserap sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel tingkat pendidikan yang digunakan meliputi lulusan SLTA dibagi dengan lulusan D3 (TPSMA) dan lulusan S1 dibagi dengan lulusan D3 (TPS1). TPSMA dan TPS1 diduga berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran (TPT).

### **1.6.2 Hubungan Upah terhadap Pengangguran**

Hubungan upah yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak menerima upah tersebut dan tidak menerima pekerjaan yang ditawarkan, dengan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah lebih rendah dan pada tingkat upah minimalnya, maka akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran. Mulyadi (2003:9) Keynes menjelaskan para pekerja memiliki semacam serikat tenaga kerja (*Labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai kecil sekali), tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat menyebabkan jumlah permintaan akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang.

### **1.6.3 Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran**

Hubungan inflasi terhadap pengangguran apabila tingkat pengangguran rendah, maka inflasi akan tinggi. Makin rendah tingkat pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi. Sebaliknya apabila terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak (Sukirno,2000:309).

Pada tahun 1958, AW Phillips, seorang Profesor di London School of Economics menulis artikel berdasarkan studi lapangan tentang adanya hubungan antara kenaikan tingkat upah dan pengangguran di Inggris pada tahun 1861-1957. Dari hasil studi ini maka diperoleh hubungan negatif antara presentase kenaikan upah dengan pengangguran. Kurva Phillips juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Ini berarti sifat perkaitan antara inflasi harga dan tingkat pengangguran tidak berbedadengan sifat hubungan antara inflasi, upah dan tingkat pengangguran seperti yang diterangkan di atas. Pada waktu pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relatif lambat, akan tetapi makin rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku.

#### **1.6.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran**

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum Okun (*Okun's law*), diambil dari nama Arthur Okun, ekonom yang pertama kali mempelajarinya (Demburg, 1985:53). Yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP (*Gross Domestic Product*) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan pengangguran memperlihatkan ketidak merataan.

Pengangguran Berhubungan juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

## **2 METODE**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat pendidikan rasio SMA dan universitas, upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran. Dalam penelitian ini, daerah yang dijadikan objek penelitian adalah seluruh Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2012.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pengertian suatu metode ekonometrik dimana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan hanya satu disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier majemuk atau regresi linier berganda.

Sedangkan model ekonometrik atau model yang dapat ditaksir dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$P = \beta_0 + \beta_1 TPSMA_t + \beta_2 TPS1_t + \beta_3 UP_t + \beta_4 INF_t + \beta_5 PE_t + et \quad [1]$$

dimana: P adalah Pengangguran pada tahun t, TPSMA adalah Jumlah Lulusan SMA tahun t, TPS1 adalah Jumlah Lulusan S1 tahun t, UP adalah Upah Minimum pada tahun t, INF adalah Inflasi pada tahun t, PE adalah Pertumbuhan Ekonomi pada tahun t.

### 3 HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$P = 1,819535 + 0,051066 TPSMA - 0,552183 TPS1 + 0,271144 UP + 0,066107 INF + 0,079568 PE \quad [2]$$

$$SE = (0,048016)(0,093376)(0,118797)(0,010592)(0,016668)$$

$$R^2 = 0,72235368$$

Pengaruh Tingkat Pendidikan Rasio SMA (TPSMA) Terhadap Pengangguran Tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan rasio SMA yang merupakan penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA dibagi dengan penduduk lulusan Diploma yang dinotasikan TPSMA. Diasumsikan penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir SLTA dibagi dengan Diploma (TPSMA) tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga tidak dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja, akibatnya pengangguran meningkat. Menurut Imarotus dan Hendry (2013) pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka akan menentukan seseorang untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Dengan rendahnya pendidikan seseorang maka seseorang tidak dapat bersaing dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari padanya.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya, koefisien regresi untuk variabel tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) menunjukkan tanda yang positif yaitu sebesar 0,051066. Hasil dari uji signifikan secara parsial atau secara individu, pengaruh tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) terhadap tingkat pengangguran menghasilkan angka yang tidak signifikan dimana nilai dari t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu  $1,063519 < 1,661$  pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imarotus dan Hendry (2013), dimana hasil temuan menjelaskan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang rendah berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran. Hal ini berarti dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan diikuti oleh terjadinya peningkatan tingkat pengangguran. Masih mengikuti teori karena semakin tinggi tingkat pendidikan mudah pula untuk mendapatkan pekerjaan, jika dibandingkan TPSMA lebih kecil tingkat pendidikannya dari TPS1. Jadi hasilnya tidak signifikan.

### **3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Rasio Universitas (TPS1) terhadap Pengangguran**

Tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan rasio universitas yang merupakan penduduk yang menamatkan pendidikan sarjana dibagi dengan penduduk lulusan Diploma yang dinotasikan TPS1. Diasumsikan penduduk yang menamatkan pendidikan terakhir sarjana dibagi dengan tamatan pendidikan diploma (TPS1) mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, sehingga dapat berkompetisi di pasar tenaga kerja. Akibatnya lebih mudah untuk masuk dan diterima di pasar tenaga kerja dan diserap sebagai tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah.

Merizal (2008) mengungkapkan pendidikan tinggi sebagai pemasok tenaga kerja terdidik memiliki arti penting dalam menjawab lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan terlatih dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyediaan tenaga kerja terdidik meliputi jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, baik untuk usaha industri, perusahaan, maupun perkantoran. Koefisien regresi untuk variabel tingkat pendidikan rasio universitas (TPS1) menunjukkan tanda yang negatif, yaitu sebesar  $-0,552183$ . Hasil dari uji signifikan secara parsial atau secara individu, pengaruh tingkat pendidikan rasio universitas (TPS1) terhadap tingkat pengangguran menghasilkan angka yang signifikan dimana nilai dari  $t$ -hitung lebih besar dari nilai  $t$ -tabel yaitu  $-5,913533 < 1,661$  pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen.

Nilai koefisien sebesar  $-5,913533$  mempunyai arti bahwa nilai yang akan didapatkan apabila variabel tingkat pendidikan rasio universitas (TPS1) naik sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh penurunan variabel tingkat pengangguran sebesar  $-5,913533$  persen. Begitupun dengan sebaliknya, apabila nilai variabel tingkat pendidikan rasio universitas (TPS1) turun sebesar 1 persen, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai tingkat pengangguran sebesar nilai yang sama, yaitu  $-5,913533$  persen, *ceteris paribus*.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Daryono Soebagiyo, Maulidah I.H, dan Chuzaim (2005). Yang menemukan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Hal ini berarti dengan tingkat pendidikan tinggi yang meningkat diikuti oleh terjadinya penurunan tingkat pengangguran. Hasil tersebut sesuai dengan teori Human Capital (Mankiw, 2006:57). Teori Human Capital menyebutkan dengan bertambahnya satu tahun tingkat jenjang pendidikan yang diselesaikan dapat meningkatkan kemampuan kerja seseorang. Secara teoritis dengan tingkat pendidikan yang di miliki seseorang maka kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran bagi seseorang yang memiliki lulusan pendidikan lebih tinggi lebih terbuka dibandingkan dengan kelompok yang berpendidikan lebih rendah.

Dengan tingginya tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan pendidikan rasio yang lebih tinggi merupakan pendidikan rasio universitas yang dinotasikan dengan TPS1, seseorang mampu bersaing di dunia kerja yang lebih luas, mereka mampu masuk ke semua tingkat jenjang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi pun lebih memiliki skill yang lebih, sehingga perusahaan lebih memilihnya untuk dipekerjakan dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi.

### **3.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya, koefisien regresi untuk variabel rata-rata upah yaitu sebesar 0,271144. Hasil dari uji signifikan secara parsial atau secara individu, pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran menghasilkan angka yang signifikan dimana nilai dari t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $2,282408 > 1,661$  pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata upah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mustika (2010) dan Farid Ahmad (2012). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa upah signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh nilai koefisien positif yang terjadi antara upah terhadap tingkat pengangguran pada studi kasus 33 Provinsi di Indonesia. Pemerintah harus menyelaraskan antara kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dengan pendapatan masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dengan cara melakukan evaluasi rata-rata upah per provinsi setiap 3 bulan sekali mengikuti kebutuhan dan standar hidup di 33 provinsi di Indonesia.

### **3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya, koefisien regresi untuk variabel inflasi menunjukkan tanda yang positif, yaitu sebesar 0,066107. Hasil dari uji signifikan secara parsial atau secara individu, pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran menghasilkan angka yang signifikan dimana nilai dari t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $6,241278 > 1,661$  pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen. Nilai koefisien sebesar 0,066107 mempunyai arti bahwa nilai yang akan didapatkan apabila variabel tingkat inflasi naik sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh kenaikan variabel tingkat pengangguran sebesar 0,066107 persen. Begitupun dengan sebaliknya, apabila nilai variabel tingkat inflasi turun sebesar 1 persen, maka akan diikuti oleh penurunan nilai tingkat pengangguran sebesar nilai yang sama, yaitu 0,066107 persen, *ceteris paribus*.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Agustina Mustika (2010) dan Farid Ahmad (2013) yang mengatakan bahwa inflasi signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hubungan positif ini terutama terjadi pada wilayah dengan pertumbuhan populasi yang tinggi. Hal ini karena pertumbuhan populasi yang tinggi dapat mengakibatkan pertumbuhan yang tinggi pula terhadap angkatan kerja, sehingga jika lapangan kerja tidak mampu menyerap semua perubahan tersebut, pengangguran akan meningkat. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh negatif antara tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran pada studi kasus 33 Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2012.

Fenomena pada tahun 2005 dan tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan inflasi yang diakibatkan oleh meningkatnya BBM dan krisis global. Ketika inflasi meningkat wilayah tersebut sedang mengalami krisis, daya beli masyarakat turun sehingga investor sulit untuk mendapatkan keuntungan atau return dari keadaan tersebut. Investor tidak berminat untuk menginvestasikan modalnya ketika terjadi peningkatan inflasi. Ketika tidak adanya investasi maka pencari kerja tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro,

menurut (Kuncoro, 2013:59) hubungan positif antara inflasi dan pengangguran di Indonesia terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi selama periode 1997 sampai dengan pertengahan tahun 1999 menyebabkan gangguan di sisi *supply* yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga lebih dari 13 persen yang pada gilirannya menyebabkan pengangguran meningkat.

Oleh karena itu, hasil ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Analisis A.W. Phillips melalui kurva yang dikenal dengan kurva Phillips tidak sesuai dengan kondisi inflasi dan pengangguran pada studi kasus 33 Provinsi tersebut. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan jumlah pengangguran pada studi kasus 33 Provinsi di Indonesia dihubungkan dengan teori analisis A.W. Phillips.

### **3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomian terhadap Pengangguran**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya, koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,079568. Hasil dari uji signifikan secara parsial atau secara individu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran menghasilkan angka yang signifikan dimana nilai dari t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $4,773621 > 1,661$  pada tingkat kepercayaan sebesar 5 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kembarsari (2010) Dari hasil regresi ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui PDRB signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah faktor investasi yang ada dalam industri atau sektor ekonomi lainnya.

Dengan meningkatnya investasi, pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. Pemerintah harus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dengan cara memperbesar nilai investasi di setiap provinsi di Indonesia agar bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh penurunan jumlah pengangguran.

## **4 SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya tentang penelitian pengaruh tingkat inflasi, rata-rata upah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Variabel tingkat pendidikan rasio SMA (TPSMA) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran studi kasus pada 33 Provinsi di Indonesia. Artinya kenaikan tingkat pendidikan TPSMA tidak berpengaruh signifikan dalam peningkatan tingkat pengangguran.

Variabel tingkat pendidikan rasio Universitas (TPS1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran studi kasus pada 33 Provinsi di Indonesia. Artinya setiap ada kenaikan tingkat pendidikan TPS1 sebesar 1 persen, maka akan menurunkan tingkat pengangguran.

Variabel upah signifikan terhadap tingkat pengangguran studi kasus pada 33 Provinsi di Indonesia. Artinya kenaikan rata-rata upah berpengaruh signifikan dalam penurunan tingkat pengangguran.

Variabel inflasi (INF) signifikan terhadap tingkat pengangguran studi kasus pada 33 Provinsi di Indonesia. Artinya setiap ada kenaikan inflasi sebesar 1 persen, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan Inflasi maka tingkat pengangguran akan menurun.

Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran studi kasus pada 33 Provinsi di Indonesia. Artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam penurunan tingkat pengangguran.

#### **4.2 Saran**

Dengan mempertimbangkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan hal-hal seperti di bawah ini:

Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi masyarakat sehingga rasio masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah seperti tingkat pendidikan rasio SMA dapat melanjutkan pendidikannya kembali ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga rasio masyarakat yang memiliki pendidikan rendah atau rasio SMA dapat berkurang setiap tahunnya sehingga nantinya memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan kemampuan masyarakat sehingga rasio masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi seperti Pendidikan rasio universitas agar dapat terserap di pasar tenaga kerja. Mengingat 33 Provinsi di Indonesia merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Agar mempunyai daya saing dengan keahlian dibidangnya masing – masing Pemerintah dapat mendukung dengan program beasiswa perguruan tinggi sehingga masyarakat di 33 Provinsi di Indonesia terpacu untuk melanjutkan pendidikannya kembali ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti beasiswa yang diberikan oleh 33 Provinsi di Indonesia kepada mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

#### **5 REFERENSI**

Afrida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Agustina, Mustika. (2010). *Analisis tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Semarang*.
- Akbar, Sis Putro dan Achma, Hendra Setiawan. (2013). *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan BTP Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010*.
- Akbar, Sis Putro dan Achma, Hendra Setiawan. (2013). *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan BTP Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1-1. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anggun, Kembar Sari. (2012). *Analisis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatra Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang.
- Aris, Ananta. (1990). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Unit penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
- Daryono, Soebagyo dan Maulidiyah, Chuzaimah. (2005). *Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Beban/ Tanggungan dan Pendidikan Tinggi Terhadap Pengangguran di Provinsi Dati I Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.6 No.1. Surakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE UMS.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics Fourth Edition*. McGraw-Hill Companies, New York.
- Gujarati, D. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga, Jakarta.
- Imarotus, Suaidah dan Hendry, Cahyono. 2013. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unesa.
- Isti, Qomariyah. (2013). *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur*. Jurnal ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- Jhingan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo persada, Jakarta
- Jhingan, M.L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2000). *Teori Makroekonomi*, Edisi Ke-empat. Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Principles of Economic. Pengantar Ekonomi Makro*. Erlangga, Jakarta.



- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Terjemahan dari *Macroeconomics*. Worth Publishers. Liza, F dan Imam Nurmawan, [penerjemah]. Erlangga, Jakarta. 2006. *Principles Of Economic Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Salemba, Jakarta.
- Mudrajad, Kuncoro. (2013). *Indikator Ekonomi*. Upp STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi SDM Dalam Perspektif Pembangunan*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni Komang, Sopianti dan A.A Ketut, Ayuningsasi. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana.
- Paul. A. Samuelson dan William D. Nordhaus. (2004). *Ilmu Makroekonomi Makro*. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Ratna, Fatmi. (2010). *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta.
- Riza, Adytia Surya. (2010). *Analisis Tingkat Pengangguran Di Kota Semarang*. Jurnal Ekonometrika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. Serang dalam Angka. BPS Provinsi Banten 2001-2010, Serang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukirnio, Sadono. (2008). *Makro Ekonomi Pengantar Teori*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2003). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.